

IMPLEMENTASI MODEL KEBIJAKAN PROSPEK: DATA IPH KABUPATEN LOMBOK TIMUR 2024

LALU MUH. KABUL*

Universitas Teknologi Mataram

lpp.lombok@gmail.com (corresponding)

ABSTRAK

Fokus penelitian ini adalah implementasi model kebijakan prospek. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan fenomenologi dengan rancangan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model kebijakan prospek merupakan paradigma terbaru dalam implementasi kebijakan publik. Implementasi model kebijakan prospek di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2024 didukung oleh data Indek Perkembangan Harga (IPH). Dalam pada itu, data IPH dipublikasikan setiap minggu oleh Kemendagri melalui Pertemuan berkala Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang berlangsung secara berkala setiap minggu

Kata kunci: Model kebijakan; prospek; indeks perkembangan harga (IPH)

ABSTRACT

Focus of the study is implementation model of prospect policy. The study uses a phenomenological approach with qualitative design. The study result showed that prospect policy model is a newest paradigm of public policy implementation. Implementation of prospect policy model in East Lombok Regency in 2024 is supported by price progress index (PPI). Meanwhile, PPI data is published each week by Ministerial Home Affairs through weekly meeting of Regional Inflation Monitoring Team.

Keywords: Policy model; prospect; price progress index (PPI)

PENDAHULUAN

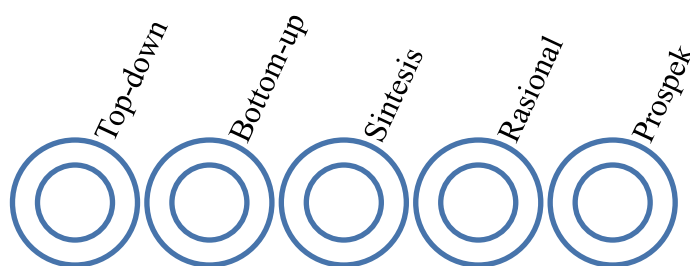
Kebijakan publik menurut Dye (2013) yakni apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dalam pada itu, Dye mengutip David Easton (1953) mengenai kewenangan alokasi nilai untuk seluruh masyarakat. Lebih jauh menurut Dye, persoalannya apakah pemerintah selaku pemilik kewenangan melaksanakan kewenangannya dalam alokasi nilai tersebut atau tidak. Oleh karena itu, menurut Dye apapun yang dipilih pemerintah yakni melaksanakan atau tidak melaksanakan alokasi nilai dimaksud memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat. Kebijakaan publik dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah (Anderson, 2003).

Tahapan pembuatan kebijakan publik atau siklus kebijakan meliputi penyusunan agenda (*agenda setting*), formulasi kebijakan (*policy formulation*), implementasi kebijakan (*policy implementation*), penilaian kebijakan (*policy assessment*), dan adaptasi kebijakan (*policy adaptation*) (Dunn, 2018). Implementasi kebijakan seringkali tidak dipandang penting karena hanyalah merupakan pelaksanaan saja dari apa yang telah diputuskan legislatif atau para pengambil kebijakan sehingga kurang berpengaruh. Dalam kenyataannya tidaklah demikian, betapapun hebatnya suatu rencana program, tetapi bila tidak diimplementasikan dengan baik akan menjadi sia-sia (Keban, 2019). Mengenai pentingnya implementasi kebijakan tersebut dikemukakan pertama kali pada tahun 1970-an oleh Jeffry Pressman dan Aaron Wildavsky (1984) dalam bukunya "Implementation". Dalam pada itu, Pressman dan Aaron Wildavsky (1984) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai kemampuan guna mewujudkan suatu rantai saling keterkaitan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sementara, Mazmanian & Sabatier (1983) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai sebuah pelaksanaan dari kebijakan yang telah diputuskan oleh pimpinan.

Implementasi kebijakan merupakan sesuatu yang penting. Oleh karena itu, implementasi kebijakan perlu dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, agar kebijakan dimaksud benar-benar dapat berfungsi

sebagai alat untuk merealisasikan harapan yang diinginkan. Dengan kata lain, implementasi kebijakan merupakan upaya untuk merealisasikan kebijakan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya (Tachjan, 2006). Lebih jauh Tachjan (2006) menyatakan bahwa sekalipun implementasi kebijakan memainkan peranan penting dalam merealisasikan misi suatu kebijakan, tetapi tidak berarti bahwa implementasi kebijakan terpisahkan dari tahapan formulasi. Keberhasilan suatu kebijakan sangat tergantung pada tatanan kebijakan makro dan mikro. Artinya formulasi kebijakan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku keberhasilan implementasinya dipengaruhi oleh kebijakan operasional serta kelompok sasaran. Dengan demikian, implementasi kebijakan tidak hanya mencakup operasionalisasi kebijakan kedalam mekanisme birokratis, tetapi juga terkait dengan bagaimana kebijakan tersebut dapat diterima, dipahami, dan didukung oleh kelompok sasaran.

Implementasi kebijakan meliputi beberapa model. Menurut Hill & Hupe (2022) implementasi kebijakan meliputi model “top-down”, model “bottom-up”, dan model sintesis/hybrid (Hill & Hupe, 2002). Lebih jauh Hill & Hupe (2002) menyatakan bahwa implementasi model kebijakan “top-down” dikembangkan antara lain oleh Van Meter & Van Horn (1975), Sabatier & Mazmanian (1980). Disisi lain, implementasi model kebijakan “bottom-up” dikembangkan oleh Michael Lipsky (1980), Elmore (1980). Sementara, implementasi model kebijakan sintesis dikembangkan oleh Majone & Wildausky (1970), Ripley & Franklin (1982), Goggin et al (1990), Winter (1990). Selain implementasi model kebijakan “top-down”, “bottom-up”, dan sintesis; model kebijakan lainnya adalah model rasional (Signè, 2017) dan model prospek (Thaler, 2017). Perkembangan implementasi model kebijakan ditampilkan pada gambar 1.



Gambar 1. Perkembangan Implementasi Model Kebijakan

Sumber: Hill & Hupe (2023), Signè (2017), Thaler, 2017

Implementasi model kebijakan rasional dikembangkan pertama kali oleh von Neumann & Morgenstern pada tahun 1944 (Thaler, 2017) dimana model kebijakan rasional ini berkaitan dengan pengambilan keputusan yang memaksimalkan nilai harapan (“expected utility”) dan nilai harapan merupakan nilai guna (“utility”) dikalikan dengan probabilitasnya. Thaler memperoleh Nobel Ekonomi pada tahun 2017. Kapasitas pikiran manusia dalam memformulasikan dan pemecahan masalah yang begitu kompleks “sangat terbatas” dibandingkan jumlah masalah yang memerlukan pemecahan rasional di dunia nyata, sehingga rasional tersebut bersifat “bounded rationality” atau rasional terbatas (Simon, 1953). Simon meraih Nobel Ekonomi pada tahun 1978. Sejalan dengan rasionalitas terbatas dimaksud kemudian Kahneman dan Tversky mengembangkan model prospek pada tahun 1979 yang kemudian dalam penelitian ini dikenal dengan model kebijakan prospek (Thaler, 2017). Sementara, Kahneman memperoleh Nobel Ekonomi pada tahun 2002. Berbagai penelitian mengenai implementasi model kebijakan yang umumnya banyak dilakukan yakni berkaitan dengan model kebijakan “top-down”, “bottom-up”, sintesis (Püzl&Treib,2007) dan model rasional (Signè, 2017). Sedangkan penelitian mengenai model kebijakan prospek relatif jarang dilakukan karena model kebijakan prospek tersebut adalah relatif baru. Dalam pada itu, kebaruan (*novelty*) penelitian ini yakni model kebijakan prospek dengan fokus pada konsep dan data empirik dalam konteks Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Kabupaten Lombok Timur.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) bagaimana implementasi model kebijakan prospek secara konseptual ?, (2) bagaimana dukungan data empiris terhadap implementasi model kebijakan prospek dalam konteks Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Kabupaten Lombok Timur ?.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut: (1) menganalisis implementasi model kebijakan prospek secara konseptual, (2) menganalisis dukungan data empiris terhadap implementasi model kebijakan prospek dalam konteks Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Kabupaten Lombok Timur.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Fokus

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan fenomenologi dengan rancangan kualitatif (Creswell, 2007; Kabul et al, 2021). Dalam konteks pendekatan fenomenologi dimana fenomena yang tampak di permukaan termasuk fenomena yang terselubung (*tacit knowledge*) pada diri informan baru bisa dipahami atau dijelaskan manakala bisa dibongkar atau diungkap dari dunia kesadaran, pengalaman dan pengetahuan informan sehingga diperoleh makna dari suatu fenomena (Craswell, 2007; Faisal, 2003). Fokus penelitian ini meliputi model kebijakan prospek secara konseptual dan data empiris model kebijakan prospek dalam konteks Indeks Perkembangan Harga (IPH).

Pengumpulan dan Analisis Data

Informan dalam penelitian ini sebanyak 50 orang yang ditentukan secara “quota sampling” yaitu Bagian Ekonomi Setda Kab. Lombok Timur (10 orang), Dinas Perdagangan Lombok Timur (10 orang), BPS Lombok Timur (10 orang), Dinas Ketahanan Pangan Lombok Timur (10 orang), Dinas Pertanian Lombok Timur (10 orang). Data primer dikumpulkan dari informan melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) dan *Focus Group Discussion*/FGD. Sementara data sekunder berupa dokumen dikumpulkan dari badan/dinas terkait di Lombok Timur. Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan analisis interaktif Miles dan Huberman & Saldana (2014) dan Content Analysis (Prasad, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Model Kebijakan Prospek

Dalam model kebijakan rasional yang dikembangkan pertama kali oleh von Neumann & Morgenstern pada tahun 1944 bahwa model kebijakan rasional ini berkaitan dengan pengambilan keputusan yang memaksimalkan nilai harapan (“expected utility”) dan nilai harapan merupakan nilai guna (“utility”) dikalikan dengan probabilitasnya (Thaler, 2017). Jika nilai harapan (“expected utility”) disimbolkan dengan EU dan nilai guna (“utility”) disimbolkan dengan U, maka untuk nilai guna sebesar x dengan probabilitas p diperoleh $EU = pU(x)$. Berikut ada 2(dua) pilihan yang dikemukakan oleh Maurice Allais (1953) yaitu pilihan A dan pilihan B. Mengenai kedua pilihan tersebut yakni Pilihan A dan Pilihan B dilakukan percobaan pada 72 orang ($N=72$). Dalam pada itu, pilihan A meliputi nilai guna 2.500 dengan probabilitas 0,33 kemudian nilai guna 2.400 dengan probabilitas 0,66 dan nilai guna 0 (nol) dengan probabilitas 0,01. Pilihan B memiliki nilai guna 2.400 dengan probabilitas sebesar 1 (kepastian). Berdasarkan model kebijakan rasional, maka nilai harapan dari pilihan A $[EU(A)]$ yaitu $2.500(0,33) + 2.400(0,66) + 0(0,01) = 2.409$ atau $EU(A) = 2.409$. Disisi lain nilai harapan dari pilihan B $[EU(B)]$ yaitu $2.400(1) = 2.400$. Dengan perkataan lain, $EU(A) > EU(B)$ atau $EU(A)$ lebih besar dari $EU(B)$.

Berdasarkan model kebijakan rasional yang terpilih adalah Pilihan A karena $EU(A) > EU(B)$, namun berdasarkan hasil percobaan Maurice Allais (1953) diperoleh bahwa yang terpilih bukanlah Pilihan A melainkan Pilihan B dimana Pilihan A dipilih oleh 18 persen ($N=13$) dan Pilihan B dipilih oleh 82 persen ($N=59$). Dengan perkataan lain, hasil percobaan Maurice Allais tersebut mengalami penyimpangan atau tidak sesuai dengan model kebijakan rasional dan fenomena inilah yang kemudian dikenal sebagai “Allais Paradoks”. Muris Allais memperoleh Nobel Ekonomi pada tahun 1988. Berkaitan dengan adanya fenomena penyimpangan dimaksud kemudian Kahneman dan Tversky (1979) mengembangkan teori prospek dimana dalam konteks kebijakan publik dikenal sebagai model kebijakan prospek. Model kebijakan prospek yakni pengambilan keputusan yang dilakukan dalam risiko dan ketidakpastian.

Model prospek yang dikembangkan oleh Kahneman dan Tversky (1979) meliputi prospek positif dan prospek negatif sebagaimana ditampilkan pada tabel 1. Pada soal 3 sebagaimana ditampilkan pada tabel 1 terjadi fenomena “Allais Paradoks” dimana nilai 3.000 menjadi pilihan terbanyak sebesar 80 persen karena kepastian (disebut juga *efek kepastian*) dengan probabilitas 1 (kepastian) dan 4.000 meskipun nilainya lebih besar tetapi probabilitasnya lebih kecil yakni 0,80 sehingga hanya dipilih oleh 20 persen. Disisi lain, Soal 4 jika dikaitkan dengan Soal 3, maka Soal 4 dapat dinyatakan dalam bentuk $(4.000; 0,20/0,80)$ dan $(3.000; 0,25/1)$ atau $(4.000; 0,25)$ dan $(3.000; 0,25)$ dimana 4.000 dan 3.000 pada Soal 4 ini memiliki probabilitas sama yakni 0,25. Karena memiliki probabilitas sama, maka yang menjadi pilihan pada Soal 4 adalah yang memiliki nilai tertinggi yaitu 4.000 yang

dipilih oleh 65 persen. Dalam pada itu, fenomena probabilitas yang terjadi pada Soal 4 tersebut juga dikenal sebagai *efek probabilitas*.

Tabel 1. Model Prospek

	Prospek Positif		Prospek Negatif
Soal 3 N=95	$(4.000 ; 0,80) < (3.000)$ [20] [80]*	Soal 3' N=95	$(-4.000 ; 0,80) > (-3.000)$ [92]* [8]
Soal 4 N=95	$(4.000 ; 0,20) > (3.000 ; 0,25)$ [65]* [35]	Soal 4' N=95	$(-4.000 ; 0,20) < (-3.000 ; 0,25)$ [42] [58]*
Soal 7 N=66	$(3.000 ; 0,90) > (6.000 ; 0,45)$ [86]* [14]	Soal 7' N=66	$(-3.000 ; 0,90) < (-6.000 ; 0,45)$ [8] [92]*
Soal 8 N=66	$(3.000 ; 0,002) < (6.000 ; 0,001)$ [27] [73]*	Soal 8' N=66	$(-3.000;0,002)>(-6.000;0,001)$ [70]* [30]

Sumber : Kahneman dan Tversky (1979).

Pada Soal 7 sebagaimana ditampilkan pada tabel 1 keduanya memiliki nilai harapan yang sama yaitu 270 tetapi yang paling banyak dipilih (86 persen) adalah nilai 3.000 karena meskipun nilainya lebih kecil tetapi memiliki prospek probabilitas kemenangan lebih besar yakni 0,90 sementara nilai 6.000 pemilihnya sedikit oleh 14 persen karena meskipun nilai lebih besar tetapi prospek probabilitas kemenangannya kecil hanya 0,45. Dengan perkataan lain, nilai 3.000 memiliki probabilitas jauh lebih tinggi daripada 6.000. Oleh karena itu, 3.000 menjadi pilihan terbanyak yakni sebesar 86 persen dan fenomena pada Soal 7 ini juga dikenal sebagai *efek probabilitas*. Pada soal 8 dimana nilai 3.000 maupun 6.000 memiliki prospek probabilitas yang sangat kecil yakni masing-masing sebesar 0,002 dan 0,001 sehingga pilihan yang paling memungkinkan yakni memilih nilai tertinggi yakni 6.000. Fenomena yang terjadi pada Soal 8 dikenal dengan *efek posibilitas*. Model prospek sebagaimana ditampilkan pada tabel 1 dimana prospek negatif merupakan kondisi sebaliknya dari prospek positif dan fenomena ini dikenal dengan *efek refleksi*.

Model prospek sebagaimana ditampilkan pada tabel 1 secara matematis dapat dinyatakan dalam bentuk simbol matematis (x, p, y, q) dimana x adalah sebuah nilai tertentu yang memiliki probabilitas p dan y juga sebuah nilai tertentu dengan probabilitas q. Dalam konteks model rasional, maka bentuk simbol matematis tersebut dinyatakan dalam persamaan matematis nilai harapan (EU) untuk kondisi awal w yaitu $(EU)=pU(w+x) + qU(w+y)$ dimana $p+q=1$. Dalam pada itu, untuk konteks model prospek untuk nilai fungsi x dan fungsi y masing-masing dinyatakan sebagai $v(x)$ dan $v(y)$ dengan probabilitas masing-masing sebesar $\pi(p)$ dan $\pi(q)$ dimana $p+q<1$ atau $x\geq 0\geq y$ atau $x\leq 0\leq y$, maka diperoleh persamaan matematis model prospek yaitu $V(x,p;y,q)=\pi(p)v(x)+\pi(q)v(y)$, tetapi jika $p+q=1$ dan $X>0y>0$ atau $X<y<0$, maka diperoleh $V(x,p;y,q)=v(y)+\pi(p)[v(x)-v(y)]$.

Dalam persamaan matematis tersebut terkandung 2 (dua) komponen yaitu $v(y)$ merupakan komponen bebas risiko dan nilai perbedaan dari $v(x)-v(y)$ merupakan komponen berisiko. Sebelumnya telah disebutkan bahwa model kebijakan prospek merupakan pengambilan keputusan yang dilakukan dalam risiko dan ketidakpastian. Berkaitan dengan hal dimaksud, hasil dari model kebijakan prospek yakni bisa menguntungkan ("*gain*") dan bisa juga merugikan ("*loss*").

Data IPH

Kecenderungan meningkatnya harga barang secara umum dan terus menerus dalam periode tertentu dikenal dengan inflasi (Pokjanas TPID, 2014). Sebaliknya penurunan harga barang dan jasa secara terus menerus dalam periode tertentu disebut deflasi. Disisi lain, deflasi juga dikenal dengan tingkat inflasi minus. Lebih jauh dalam Pokjanas TPID (2014) disebutkan bahwa inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Disamping itu, inflasi yang rendah dan stabil berdampak pada terjaganya daya beli masyarakat. Selain itu, inflasi yang rendah dan stabil juga kondusif bagi pelaku usaha dalam pengambilan keputusan dalam melakukan kegiatan ekonomi, sehingga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi.

Di Indonesia, karakteristik inflasi banyak dipengaruhi oleh faktir kejutan (*shocks*) berupa gangguan produksi karena bencana alam seperti banjir dan musim kering berkepanjangan yang banyak mempengaruhi inflasi pada kelompok bahan makanan (*volatile food*). Disamping itu, *shocks* juga dapat berupa kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) domestik yang memberikan dampak pada kelompok komoditas yang harganya diatur oleh pemerintah (*administered prices*). Oleh karena itu, inflasi tidak dapat hanya direspon oleh kebijakan moneter yang merupakan tugas bank sentral, tetapi juga diperlukan dukungan pemerintah dan pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengatasi *shocks* tersebut (Pokjanas TPID, 2014).

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam pengendalian inflasi diperlukan koordinasi yang kuat antara Bank Indonesia dan Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Untuk itu, di tingkat pusat diperkuat dengan pembentukan Tim Pengendali Inflasi (TPI) sejak tahun 2005 dan di daerah telah dibentuk wadah Tim Pengendali

Inflasi Daerah (TPID) mulai tahun 2008. Dalam konteks inflasi baik inflasi maupun deflasi oleh BPS (Badan Pusat Statistik) diukur dengan indeks yang dikenal dengan Indeks Harga Konsumen (IHK). Inflasi yang diukur dengan IHK oleh BPS dipublikasikan secara berkala setiap bulan. Dalam pada itu, IHK diperoleh dari data hasil pengolahan survei harga konsumen oleh BPS di 90 kota inflasi di Indonesia. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terdapat 3 (tiga) kota inflasi yaitu Kota Mataram, Kota Sumbawa dan Kota Bima. Dan indikator yang digunakan untuk mengukur inflasi diluar ketiga kota inflasi tersebut adalah Indeks Perkembangan Harga (IPH). Disisi lain, IPH ini dipublikasikan secara berkala setiap minggu dalam rapat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) oleh Kementerian Dalam Negeri.

IPH merupakan indeks untuk mengukur perubahan harga-harga 20 komoditas yang memiliki bobot besar dalam IHK. IPH dapat membantu pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga-harga pangan. Perhitungan IPH ini oleh BPS bersumber dari data pemantauan harga kebutuhan pokok setiap hari yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan. Dalam perhitungan IPH secara statistik digunakan metode indeks Laspeyres. Metode ini dikembangkan oleh Etienne Laspeyres (1834-1913) seorang ahli ekonomi dan ahli statistik asal Jerman.

Di Kabupaten Lombok Timur dimana inflasi yang digunakan yakni inflasi yang diukur berdasarkan IHK, bukan IPH dan hal ini tampak dalam indikator utama RPJMD Lombok Timur 2018-2023 maupun RPD 2024-2026. Dalam konteks model kebijakan prospek, tentu hal ini bukan bersifat menguntungkan (“gain”) justru sebaliknya merugikan (“loss”) karena indikator inflasi yang digunakan yakni inflasi berdasarkan IHK bukan IPH sementara inflasi IHK tersebut hanyalah tepat digunakan di Kota Mataram. Inflasi berdasarkan IHK inilah yang selalu dipublikasikan oleh BPS NTB setiap bulan sehingga inflasi berdasarkan IHK inilah yang tersedia (“available”) dalam memori publik akibatnya inflasi berdasarkan IHK tersebut kemudian diadopsi sebagai sebuah indikator yang benar dan tepat bagi Lombok Timur. Fenomena inilah yang oleh Kahneman et al (1982) disebut sebagai *available heuristic*.

Fenomena *available heuristic* dimaksud digambarkan oleh Thaler (1980) dimana dalam sebuah kelas terdapat 25 orang siswa dan pertanyaannya: berapa peluang paling tidak dua siswa memiliki hari ulang tahun yang sama?. Menurut Thaler (1985) hampir semua orang menjawab salah dimana peluangnya relatif kecil yakni 1 per 10 (1/10) atau 1/20. Faktanya, peluang paling tidak sepasang siswa memiliki hari ulang tahun yang sama justru lebih dari 0,5. Hal ini menggambarkan mengenai perkiraan hampir semua orang mengenai sesuatu yang dianggapnya benar, tetapi faktanya justru keliru. Disisi lain dalam konteks kebijakan publik, Thaler (1985) menggambarkan fenomena *available heuristic* tersebut dalam karyanya “Illusions and Mirages in Publik Policy” dengan menggunakan2 (dua) buah contoh kebijakan.

Contoh kebijakan dimaksud adalah Pembangkit Listrik Tenaga Batubara (PLTB) dan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Menurut Thaler (1985) bahwa faktanya PLTB justru lebih berbahaya daripada PLTN karena PLTB dapat berdampak negatif terhadap lingkungan berupa terjadinya “hujan asam”. Tetapi hampir saemua orang justru beranggapan sebaliknya bahwa justru PLTN yang lebih berbahaya daripada PLTB dimana hal ini ditunjukkan oleh frekuensi demonstrasi yang menentang penggunaan PLTN jauh lebih banyak daripada demonstrasi yang menentang penggunaan PLTB dan terlebih lagi setelah pemutaran film “The China Syndrome” yang mengisahkan mengenai bahaya nuklir.

Demikian halnya dengan inflasi berdasarkan IHK yang hanya berlaku di Kota Mataram dianggap oleh hampir semua orang dibenarkan untuk diberlakukan juga di Kabupaten Lombok Timur, tetapi justru keliru. Dalam pada itu, proxy inflasi yang benar dan tepat bagi Lombok Timur bukanlah inflasi berdasarkan IHK, melainkan IPH.

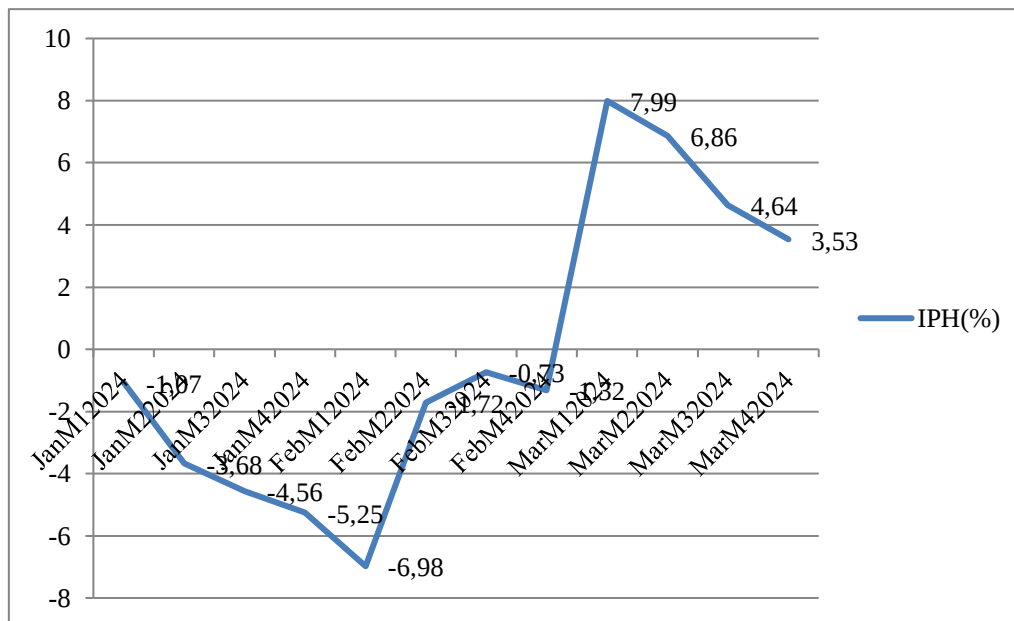
Kekeliruan dalam menggunakan inflasi berdasarkan IHK tersebut di Lombok Timur tampak dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lombok Timur 2018-2023 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Lombok Timur 2024-2026. Dalam kedua dokumen tersebut proxy inflasi yang digunakan adalah inflasi berdasarkan IHK, seharusnya inflasi berdasarkan IPH. Disisi lain, data IPH dapat diperoleh dari pertemuan berkala TPID Kabupaten Lombok Timur yang berlangsung secara berkala setiap minggu. Namun data IPH tersebut oleh pemerintah daerah tidak dipublikasikan secara transparan kepada publik, sehingga pengetahuan publik terbatas hanya pada data inflasi berdasarkan IHK yang dipublikasikan secara transparan oleh BPS NTB setiap bulan.

Data inflasi di Lombok Timur pada bulan Januari 2024 hingga Maret 2024 berdasarkan data IPH ditampilkan pada gambar 2. Berdasarkan data IPH sebagaimana ditampilkan pada grafik dimana terjadi tingkat inflasi minus atau deflasi pada Minggu 1 Januari 2024 hingga Minggu 4 Februari 2024. Pada Minggu 1 Januari 2024 nilai IPH sebesar minus (-1,07 persen) kemudian mengalami penurunan hingga mencapai minus (-6,98 persen) pada Minggu 1 Februari 2024.

Meskipun tingkat inflasi mengalami kenaikan dari minus (-6,98 persen) pada Minggu 1 Februari 2024 menjadi minus (-1,72 persen) pada Minggu 2 Februari 2024 hingga mencapai minus (-1,32 persen) pada Minggu 4 Februari 2024, tetapi tingkat inflasi masih tetap minus atau deflasi. Dengan pekataan lain, dalam periode Minggu 1

Januari 2024 hingga Minggu 4 Februari 2024 tingkat inflasi di Lombok Timur telah berhasil dikendalikan, sehingga tingkat inflasi tetap rendah pada tingkat minus atau deflasi.

Pada Minggu 1 Maret 2024 tingkat inflasi di Lombok Timur mengalami kenaikan dengan nilai IPH mencapai 7,99 persen. Kenaikan inflasi ini berkaitan dengan menjelang datangnya puasa Ramadhan pada Maret 2024 dan harga pangan, terutama beras yang melambung tinggi sebelum tibanya musim panen. Tingkat inflasi pada Minggu 1 Maret 2024 dengan nilai IPH sebesar 7,99 persen tersebut berhasil dikendalikan sehingga mengalami penurunan menjadi 3,53 persen pada Minggu 4 Maret 2024. Target inflasi yang dikategorikan “rendah dan stabil” pada tahun 2024 yakni sebesar 2,5 persen dengan deviasi plus atau minus 1 persen. Artinya, target inflasi yang dikategorikan “rendah dan stabil” berada pada kisaran 1,5 persen (terendah) hingga 3,5 persen (tertinggi). Dengan pekataan lain, dalam periode Minggu 1 Maret 2024 hingga Minggu 4 Maret Februari 2024 tingkat inflasi di Lombok Timur sehingga mencapai kategori “rendah dan stabil”.



Gambar 2. Grafik IPH Lombok Timur 2024

Sumber : Data Primer 2024 (diolah)

PENUTUP

Simpulan

1. Model kebijakan prospek merupakan model kebijakan terbaru dalam paradigma implementasi kebijakan publik. Model kebijakan prospek merupakan pengambilan keputusan yang dilakukan dalam risiko dan ketidakpastian. Model kebijakan prospek meliputi efek kepastian, efek probabilitas, efek posibilitas, dan efek reflesi. Hasil dari model kebijakan prospek yakni bisa menguntungkan (“gain”) dan bisa juga merugikan (“loss”).
2. Implementasi model kebijakan prospek di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2024 didukung oleh data Indeks Perkembangan Harga (IPH). Dalam pada itu, data IPH dipublikasikan setiap minggu oleh Kemendagri melalui Pertemuan berkala Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang berlangsung secara berkala setiap minggu.

Saran

1. Dalam RPJMD Kabupaten Lombok Timur 2024-2029, IPH hendaknya digunakan sebagai indikator utama dalam pengendalian inflasi daerah.
2. Data IPH sebaiknya dipublikasikan secara transparan setiap minggu, agar masyarakat menegatahui perkembangan inflasi di Lombok Timur berdasarkan data IPH.
3. TPID Kabupaten Lombok Timur hendaknya menyusun “road map” sebagai upaya pengendalian inflasi.

DAFTAR PUSTAKA

Allais, M., (1953). *Le Compartement de l'Homme Rationnel devant le Risque, Critiquedes Postulats et Axiomes de l'Ecole Americaine*. Econometrica, (21):503-546.

- Anderson, J.E., (2013). *Public Policymaking: An Introduction*. Fifth edition, Houghton Mifflin Company, Boston, New York.
- Creswell, J.W., (2007). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*. SAGE Publication. Thousand Oaks, California.
- Dunn, William, N., (2004). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Dye, T.R., (2013). *Understanding Public Policy*. 14th edition, Pearson Education, Inc., One Lake St. Upper Saddle River, USA.
- Hill, M. & Hupe P., (2002). *Implementing Public Policy: Governance in Practice*. SAGE Publication, London, Thousand Oaks, New Delhi.
- Kabul LM, M. Yasin, A. Subhani, (2021). *Perencanaan Sarana dan Prasarana Penanganan Bencana Kebakaran pada Wilayah Pemukiman Padat Penduduk di Kota Mataram*. *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu dan Pendidikan Geografi*, 5(2), pp.313-321.
- Kahneman D. & Tversky A., (1979). *Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk* *Econometrica*, 47(2):263-291.
- Kahneman D., Lovic P. & Tversky A., (1982). *Judgment Under Uncertainty: Heuristic and Biases*. Cambridge University Press, Cambridge
- Keban, Y.T., (2019). *The Complexities of Regional Development Planning Reform: The Indonesian Case*. *Policy & Governance Review*, 3(1), pp.12-25.
London, New York.
- Mazmanian, D.A. & Sabatier, P.A., (1983). *Implementation and Public Policy*. First edition, Scott Foresman.
- Miles, M.B.; Huberman, A. & Saldana J., (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Third edition, SAGE, Washington, D.C.
- Pokjanas TPID, 2014. *Buku Petunjuk TPID*. Kerjasama Bank Indonesia, Kementearan Koodinator Bidang Ekonomi, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.
- Prasad, B.D., (2008). *Content Analysis: A Method in Social Science Research* dalam Lal Das, S.K. & Bhaskaran, V., (eds.): *Research Methods for Social Work*, New Delhi.
- Pressman, J.L. & Wildavsky, (1984). *Implementataion*. Third edition, University of California Press, Berkeley.
- Pülzl, H. & O. Treib, (2007). *Implementing Public Policy* dalam Fischer F. et al (ed): *Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods*. CRC Press Boca Raton,
- Signè, L., (2017). *Policy Implementation: A Synthesis of the Study Policy Implementation and Causes of Policy Failure*. OCP Policy Center, Rabat, Marocco.
- Tachjan, H., (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI Bandung bekerjasama dengan Puslit KP2N Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, Bandung
- Thaler, R.H., (1985). *Illusion and Mirages in Public Policy* dalam Cavello et al (ed): *Environmental Impcat Assessment, Technological Assesment, and Risk Analysis*. NATO ASI Series, Vo;4, Springer, Berlin, Heidenberg.
- Thaler, R.H., (2017). *From Cashews to Nudge: The Evolution of Behavioral economics*. Prize Lecture, University of Chicago, Booth School of Business, Chicago.